

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pekanbaru

Nada Meylan Syahyan Putri¹ Ema Fitri Lubis²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
nadameylansyahyanputri@student.uir.ac.id emafitrilubis@soc.uir.ac.id

Received : August 08, 2024;

Accepted : 10 August 2024

Abstract

The simple rental housing (Rusunawa) built by the Pekanbaru City Government is located in Pekanbaru, namely Rusunawa in Rejosari and Rusunawa in Yos Sudarso. This research aims to determine the management of simple rental houses (Rusunawa) carried out by the Pekanbaru City Public Housing and Settlement Service using qualitative research methods. The research instruments are observation, interviews and documentation. The theory used is according to George R Terry with indicators of planning, organizing, mobilizing and monitoring. The results of the research show that the Management of Simple Rental Flats (Rusunawa) by the Pekanbaru City Public Housing and Settlement Area Service concluded that the Rusunawa Management by the Pekanbaru City Housing and Settlement Area Service in managing the flats has not shown a stage of success. This is because there are several weaknesses seen in the government management function. The first is planning, at this stage the Department of Public Housing and Settlement Areas does not have a performance indicator program/activity focused on managing flats. The second is organizing, at this stage the Pekanbaru City Government has formed a UPTD and formulated the tasks required in managing the flat. Third, namely mobilizing/directing, the management of the Public Housing and Settlement Area Service's flats is not yet optimal, because there are still many residents who are in arrears in rent payments and there are still only a few flat residents. Fourth, namely controlling.

Keywords : Management, Rusunawa

Abstrak

Perumahan sewa sederhana (Rusunawa) yang dibangun Pemerintah Kota Pekanbaru terletak di lokasi di Pekanbaru, yaitu Rusunawa di Rejosari dan Rusunawa di Yos Sudarso. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Rumah Sewa Sederhana (Rusunawa) yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Instrumen penelitian adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teori yang digunakan menurut George R Terry dengan Indikator Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru disimpulkan bahwa Pengelolaan Rusunawa oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam pengelolaan rusunawa belum menunjukkan tahap keberhasilan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kelemahan yang di lihat dari fungsi manajemen pemerintahan. Pertama yaitu planning, pada tahap ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak memiliki program/kegiatan indikator kinerja yang difokuskan untuk pengelolaan rusunawa. Kedua yaitu organizing, ditahap ini Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk UPTD dan merumuskan tugas yang dibutuhkan dalam pengelolaan rusunawa. Ketiga yaitu penggerakan/ mengarahkan, Keempat yaitu controlling.

Kata Kunci : Pengelolaan, Rusunawa

Pendahuluan

Nada Meylan Syahyan Putri dan Ema Fitri Lubis

Pesatnya perkembangan perkotaan akan menyebabkan meningkatnya permintaan lahan di kota. Masalah yang timbul kemudian berkembang kearah kebutuhan penduduk akan tempat tinggal atau perumahan karena dari tingkat pendapatan masing-masing penduduk yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan daya beli mereka terhadap suatu tempat tinggal (rumah). Bagi penduduk kota yang berpendapatan rendah, kebutuhan tempat tinggal ini merupakan masalah yang berat bagi mereka. Penyediaan perumahan salah satu hal yang harus di hadapi wilayah perkotaan dimasa yang akan datang, seiring dengan perkembangan kota yang berlangsung cepat.

Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman sehingga diperlukan pengaturan dan penanganan perumahan dan permukiman yang lebih terintegritas. Permasalahan permukiman merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini masih sering terjadi di Indonesia, terutama pada kota-kota besar yang memiliki jumlah penduduk yang terbilang besar dan keterbatasan lahan hunian.

Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa kecamatan yang menjadi wilayah administratif wilayah tersebut. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1.1 : Jumlah penduduk kota pekanbaru tahun 2020-2022

No	Kecamatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Tampan (Bina Widya)	201.564	75.188	78.078
2.	Payung Sekaki	101.654	99.909	100.343
3.	Bukit Raya	100.096	104.348	106.273
4.	Marpoyan Damai	139.529	146.130	148.975
5.	Tenayan Raya	150.464	111.286	114.275
6.	Lima Puluh	44.936	45.578	45.433
7.	Sail	24.672	25.290	25.995
8.	Pekanbaru Kota	27.255	27.643	27.339
9.	Sukajadi	48.955	49.597	49.158
10.	Senapelan	39.473	39.819	39.220
11.	Rumbai	76.335	99.363	101.869
12.	Rumbai Pesisir	73.304	73.310	73.305

Sumber data : Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota pekanbaru

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru mengalami penurunan pada tahun 2020. Oleh karena itu, perlu adanya penyediaan fasilitas perumahan untuk meringankan beban masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal yang memadai.

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, khususnya di kawasan padat penduduk, adalah dengan pembangunan perumahan vertikal sederhana atau yang dikenal dengan rumah sewa (rusunawa). Pembangunan rumah tinggal untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin tinggi dengan mengedepankan efisiensi lahan di perkotaan yang semakin menipis. Penyelenggaraan Rusunawa dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Negara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rusunawa yang menyatakan bahwa tujuan Pengelolaan Rusunawa adalah berhasil dan berdaya guna dalam mencapai penemuan tersebut. perumahan yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi penghuninya.

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dibangun Pemerintah Kota Pekanbaru terletak di 2 lokasi di Pekanbaru, yakni Rejosari dan Yos Sudorso, Rumbai. Selain itu, Rusunawa juga dikenakan tarif bagi penghuninya berdasarkan Perwako Kota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tarif Sewa Rusunawa. Spesifikasi Rusunawa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1.2 : Data rusunawa di kota pekanbaru

No	Rusunawa	Spesifikasi	Jumlah	Tarif Sewa
1.	Rejosari	Tipe 24 (4x6) 3 Blok berlantai 4	99 Kamar	Lantai 1 Rp 275.000 Lantai 2 Rp 250.000 Lantai 3 Rp 200.000 Lantai 4 Rp 175.000
2.	Yos Sudarso	Tipe 24 (4x6) 3 Blok berlantai 4	99 kamar	Lantai 1 Rp 275.000 Lantai 2 Rp 250.000 Lantai 3 Rp 200.000 Lantai 4 Rp 175.000

Sumber Data. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023.

Program Rusunawa bertujuan untuk memastikan kebutuhan akan perumahan yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terpenuhi dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Skema ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan hunian ilegal yang banyak terjadi di perkotaan dan membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya.

Fasilitas yang didapat oleh penghuni yang menginap di Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Kamar Tidur
2. Ruang Tamu

3. Dapur
4. Kamar Mandi
5. Musola
6. Koridor Jemuran
7. Tempat Parkir
8. Fasilitas Umum

Pengelolaan Rusunawa dilakukan untuk menjamin pemeliharaan dan perbaikan yang maksimal juga di kantor kawasan perumahan dan permukiman kota pekanbaru, namun dalam perjalanannya masih banyak ditemukan warga yang seharusnya pindah namun masih berada di dalam Rusunawa tersebut. Selain itu, banyak warga Rusunawa yang menunggak pembayaran sewa Rusunawa, lebih jelasnya terlihat sebagai berikut:

Table 1.3 data penghuni rusunawa di kota pekanbaru

No	Rusunawa	Jumlah kamar	Jumlah penghuni		Jumlah Penghuni	
			Berisi	Kosong	Menunggak	Harus Keluar
1.	Rejosari	99 Kamar	14	85	3	8
2.	Yos Sudarso	99 Kamar	44	55	20	12

Sumber Data : Disperkim 2023

Dari tabel di atas, Rusunawa di rejosari dihuni 14 orang sementara kosong 85 orang, sedangkan Rusunawa di yos sudarso dihuni 44 orang sementara kosong 55 orang. Selain itu, masih banyak warga Rusunawa yang belum membayar sewa tepat waktu dan terdapat beberapa kepala keluarga yang masih tinggal di Rusunawa tersebut meskipun kehidupannya sudah lebih baik.

Adapun Syarat dan Ketentuan Untuk Menyewa di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sesuai dengan Peraturan Walikota No. 161 tentang Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rusunawa sebagai berikut :

Calon penghuni yang akan mendaftarkan sebagai Penghuni Rusunawa, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Walikota melalui Kepala DPU, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melaporkan persyaratan sebagai berikut :

a. untuk ruang hunian :

1. Fotokopi KTP suami/ istri
2. Fotokopi surat nikah
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Surat Keterangan penghasilan dari instansi/ perusahaan tempat bekerja
5. Surat Keterangan belum memiliki rumah/ tempat tinggal sendiri dari kelurahan

6. Surat pernyataan sanggup membayar sewa dan retribusi yang berlaku di Rusunawa diketahui Lurah dan Camat
7. Surat pernyataan bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku bermaterai cukup
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
9. Surat Permohonan menghuni
10. Pas photo kepala keluarga ukuran 4 x 6 cm terbaru sebanyak 2 lembar
11. Rekomendasi dari Dinas Sosial untuk hunian difable

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Nawawi (Syafii, 2013:5) bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (Afiffudin, 2010:4) Administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Zulkifli (Sedarmayanti, 2010:12) bahwa konsep administrasi diidentikan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam study administrasi dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengolahan keterangan tertulis lainnya. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja samasejumlah di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diartikan administrasi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit dimana cakupan tersebut merupakan suatu rangkaian pekerjaan ketatausahaan ataupun pengelolaan keterangan tertulis lainnya saja, namun administrasi juga berarti luas yaitu yang diartikan sebagai proses segala aktifitas serta kerja sama dalam hal mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian maka dapatlah dipahami juga bahwa administrasi merupakan sesuatu proses dalam hal pelayanan pengaturan.

Administrasi sebagai salah satu bagian dari studi ilmu social, yang cakupannya keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah manusia didalamnya organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Siagian (Afiffudin,2010:6) Administrasi adalah rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu social, yang cakupannya keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi.

Konsep Organisasi

Menurut Rosenweg (Sufian, 2013:31) organisasi didefinisikan sebagai suatu: Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok, Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama dan orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Berdasarkan pendapat Dwight Waldo (Syafiie, 2008: 114) “organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system”, yaitu organisasi merupakan “suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. Selanjutnya, kesimpulan dari pengertian organisasi tersebut, yaitu:

1. Sebagai tempat menyelenggarakan atau wadah administrasi;
2. Tempat terjadinya pembagian tugas dan kerjasama organisasi dalam pembagian tupoksi;
3. Berlangsung proses aktivitas kinerja individu;
4. Terjadinya hubungan antara individu dan kelompok baik didalam maupun diluar organisasi.

Secara global ada dua jenis organisasi yaitu organisasi publik dan organisasi-organisasi privat/swasta. Organisasi publik ialah organisasi yang bergerak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan tanpa maksud semata-mata memperoleh keuntungan, sedangkan organisasi privat/swasta ialah organisasi yang bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan maksud memperoleh keuntungan atau dengan kata lain organisasi ini memiliki tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Konsep Manajemen

Menurut M. Manulang (2018:2) manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Ordway Tead (dalam syafie 2009:41) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses dan perangkat yang mengarahkan dan membimbing kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam definisi ini menitik beratkan pada proses dan perangkat yang dipergunakan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi.

Menurut Andrew F. Sikula (2015:2) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu yang berkhusus mengenai ketenagakerjaan, sehingga sering juga dikatakan dengan *man power management*, *labour relation*, *industrian relation*, *personil administration*. *Man power management* dan *personil administration* sama dengan personil manajemen sejak perang dunia kedua, karena perhatian terhadap masalah *man power*. Sehubungan akan kebutuhan untuk angkatan perang dan perusahaan. Manulang (dalam Nuraini, 2013:4).

Menurut Michel J. Jucius (dalam Hasibuan 2017:11-12) manajemen personalia adalah lapangan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian bermacam-macam fungsi fungsi pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga :

1. Tujuan untuk apa perkumpulan didirikan dan dicapai secara efisien dan efektif.
2. Tujuan semua pegawai dilayani sampai tingkat yang optimal.
3. Tujuan masyarakat diperhatikan dan dilayani dengan baik.

Menurut Drs. Malayu P. Hasibuan, (2017) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses yang memberikan pengawasan terhadap segala hal yang berkaitan dengan penerapan strategi dan pencapaian tujuan. Secara umum Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah sesuatu agar menjadi baik dan bernilai tinggi sejak awal. Pengelolaan juga dapat diartikan melakukan sesuatu agar lebih sesuai dan sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2013:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsul menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry (2014:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja (to manager) yang berarti menangani atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan tidak hanya mencakup kinerja suatu kegiatan, tetapi juga fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Tujuan manajemen adalah untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi seperti sumber daya manusia, peralatan atau fasilitas dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemborosan waktu, tenaga dan material untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen diperlukan dalam semua organisasi karena tanpa manajemen, segala upaya akan sia-sia dan pencapaian tujuan menjadi lebih sulit.

Berikut adalah beberapa tujuan manajemen:

1. Mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.

2. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi yang saling bertentangan.
3. Tercapainya efisiensi dan efektivitas. Kinerja suatu organisasi dapat diukur dengan berbagai cara. Metode yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen secara efektif, pengelolaan dalam Said Achmad (2017:17) dengan indicator:

- a. Merencanakan
- b. Melaksanakan
- c. Mengarahkan
- d. Pengawasan/controlling

Dan Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadaan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

Konsep Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)

Demi pemenuhan kebutuhan akan perumahan bagi seetiap masyarakat, maka dilakukanlah kebijakan pembangunan Rusunawa. Pada dasarnya pembangunan perumahan ini setiap tahunnya akan mengalami peningkatan yang didasarkan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Tetapi pembangunan rusunawa ini hanya memiliki sasaran kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Tetapi meksipun demikian, tetaplah dalam pelaksanaan pembangunan rusunawa tetap memperhatikan aspek perkembangan pada suatu wilayah sehingga penghuni yang menghuni rusunawa akan memiliki kegiatan yang produktif untuk menunjang kehidupannya.

Dikarenakan memang penghuni dirusun merupakan pekerja dengan penghasilan menengah kebawah. Sehingga sangat membutuhkan suatu wilayah yang bisa dijangkau dan memiliki konsep pemenuhan kebutuhan. Penghuni rusunawa sudah diisyaratkan atau diperuntukkan hanya bagi masyarakat yang tergolong kepada penghasilan rendah atau dapat dikatakan kurang mampu. Kondisi ini bukan untuk menekan permasalahan dari penghuni namun sebagai bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan.

Pembangunan rusunawa ini diketahui merupakan bagian dari penggunaan APBN yang didasarkan kepada kebijakan dari kementerian perumahan rakyat. Namun dikarenakan pembangunan tersebut berada di Kota Pekanbaru maka diberikan kebijakan untuk mengelolanya apda pemerintah daerah. Bangunan rumah susun sederhana ini dibangun dengan pola bertingkat sehingga bisa memanfaatkan ruang satuan hunian. (Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2008).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2007, menyatakan: “penyelenggaraan rumah susun memiliki beberapa kriteria umum. Kriteria umum tersebut berupa penempatan lokasi, pemenuhan persyaratan pembangunan rumah susun, desain, biaya operasional, kelengkapan bangunan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Pembangunan dari rumah susun haruslah disesuaikan dengan tempat yang memang diperuntukan yaitu dengan lahan yang memang sesuai dengan tata ruang yang ada. Tempat pembangunan tersebut juga haruslah berdekatan dengan sarana angkutan agar bisa mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya, selain itu juga harus dilengkapi dengan sarana air dan jalinagn listrik. syarat-syarat kemudahan dalam pembangunan rumah susun ini adalah dikarenakan suatu harapan masyarakat yang akan menghuni rumah susun tersebut bisa merasakan kelebihan dari pembangunannya, baik itu dalam sarana dan prasarana yang ada di rumah susun.

Sehingga pembangunan yang dilakukan bukanlah pembangunan yang tidak mementingkan kondisi masyarakat namun lebih mengarahkan adnaya fleksibilitas masyarakat itu sendiri. Selain itu pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan adalah orang-orang yang sudah memiliki kemampuan dan kompetendi di bidangnya. Dengan kata lai di bangun oleh para ahli konstruksi. Selain memperhatikan kriteria umum, dalam pembangunan rusunawa ini juga harus memperhatikan struktur bangunan serta tatat letak sirkulasi udara serat sarana dan prasarana yang dibutuhkan didalamnya. (Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2008).

Metode

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

1. Tipe Penelitian Kualitatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Gunawan (2013:80), Pendekatan penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Jenis Penelitian Deskriptif

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, (Lexy:2011:14). Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk memaparkan suatu gejala ataupun keadaan secara sistematis sehingga objek penelitian menjadi jelas.

Hasil dan Pembahasan

Sistem perumahan dan permukiman mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian suatu bangsa. Perumahan dan permukiman dapat dipandang tidak hanya sebagai sarana penghidupan saja, melainkan sebagai suatu proses pemukiman manusia yang menciptakan tatanan kehidupan masyarakat dan mengungkapkan identitasnya.

Pengelolaan Rusunawa dilakukan untuk mencapai tingkat pemeliharaan dan perbaikan yang maksimal agar tercapainya hasil yang maksimal dari pengelolaan Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan warga yang seharusnya yang direlokasi masih berada di Rusunawa. Selain itu, banyak warga yang menunggak pembayaran sewa.

Berikut ini akan dijelaskan kegiatan pengelolaan Rusunawa, antara lain:

Perencanaan (Planning)

Perencanaan kegiatan pengelolaan rusunawa yang dijabarkan mengenai tugas pokok dan fungsi setiap pegawai dalam organisasi dengan terciptanya keteraturan pada bagian-bagian tertentu, terarah pada tujuan dan tersusun rapi serta mempunyai tujuan tugas pengelolaan rusunawa oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota pekanbaru secara maksimal.

Perlunya pengelolaan RUSUNAWA menjadi dasar dalam merencanakan program kebutuhan sarana dan prasarana yang merupakan dasar bagi pengelolaan di kawasan perumahan tersebut. Program kerja pengelolaan rusunawa telah ada yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kerja OPD Dinas Perumawahn rakyat dan kawasan permukiman Kota pekanbaru. Renstra merupakan dokumen perencanaan kerja OPD selama 5 tahun sedangkan renja merupakan dokumen kerja selama periode 1 tahun dalam kebijakan dan program pembangunan pemerintah.

Dalam perencanaan adanya upaya dalam memenuhi kebutuhan air bersih, Selain itu terdapat petugas kebersihan yang akan membersihkan lingkungan Rusunawa tetapi untuk kebersihan tiap unit Rusunawa merupakan tanggung jawab dari penghuni. Pengelola juga mempekerjakan petugas keamanan yang akan menjaga keamanan Rusunawa khususnya aset milik Rusunawa, sedangkan barangbarang berharga milik penghuni menjadi tanggung jawab dari penghuni tersebut.

Pada tahap ini pembangunan dan pengelolaan Rusunawa harus dikoordinasikan berdasarkan rencana yang telah dibuat sehingga dapat terlihat apa yang terjadi dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja pengelolaan apartemen harus terlaksana dengan baik oleh seluruh kegiatan pengelolaan, hal ini berdasarkan wawancara dengan Key Informan Kepala UPT Rusunawa Bapak Heri Rusdi S.T, menyatakan “ Kami merencanakan, menata dan mengelola apartemen agar dapat dikelola dengan baik dan merupakan suatu pengembangan yang dapat terarah, terpadu dan terfokus pada kegiatan pengelolaan apartemen secara maksimal, termasuk menjaga dan menjaga kebersihan apartemen agar tetap terlihat indah dan baik. -bangunan yang terawat” (Hasil Wawancara Pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara di atas, penulis menganalisis bahwa pelaksanaan pengelolaan rumah susun dilakukan dengan membuat rencana yang memuat rencana kerja untuk menunjang kegiatan pengelolaan rumah susun yang telah ditentukan dan terukur berdasarkan aturan yang ada. Pengelolaan Rusunawa juga dilakukan dengan pemeliharaan bangunan Rusunawa dan juga menjaga keberlangsungan Rusunawa dari kotoran-kotoran yang dapat mengganggu Rusunawa dan aktivitas lainnya.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam pengelolaan rusunawa dengan melihat apakah perencanaan yang telah direncanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengelola rusunawa berjalan dengan baik atau tidak.

Adanya perencanaan pengelolaan Rusunawa sebagai contoh memberikan pemahaman kepada aparaturnya agar kedepannya dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sehingga menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan Rusunawa. Berdasarkan wawancara dengan informan Bapak Iskandar, menyatakan “perencanaan seperti kegiatan yang dilakukan oleh pengelola saat ini belum terlaksana karena masih kurangnya sosialisasi terhadap pengelola dan penghuni yang ada di rusunawa” (Hasil Wawancara pukul 13.45 WIB)

Dari hasil survey diatas penulis dapat menganalisis bahwa perencanaan pengelolaan Rusunawa dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada unit-unit agar mampu menangani dan melaksanakan kegiatan pembangunan Rusunawa agar dapat dikelola dengan baik dan maksimal.

Pengelolaan rumah susun harus dilaksanakan semaksimal mungkin karena seluruh aspek pengelolaan telah dilakukan oleh pengelola rumah susun. Pengelolaan Rusunawa oleh pengelola diharapkan dilaksanakan semaksimal mungkin berdasarkan sistem dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam peraturan dan pengelolaan Rusunawa.

Penghuni rusunawa Informan Bapak Salim juga menyampaikan bahwa “ Seluruh perangkat yang terlibat dalam pengelolaan rumah yang ada diharapkan mampu menjalankan

dan memahami tugasnya masing-masing sehingga pengelolaan rumah tersebut dapat maksimal". (Hasil Wawancara Pukul 16.20 WIB).

Dari hasil penelitian mengenai indikator perencanaan pengelolaan rumah susun dengan membandingkan rencana yang sudah ada dengan program dan kegiatan yang telah disusun, walaupun masih terdapat program kegiatan pengelolaan yang belum berjalan dengan baik. Sehingga dalam pengelolaan rusunawa yang mungkin menyebabkan beberapa rusunawa mengalami kerusakan pada rusunawa tersebut, maka perlu dilakukan pemeliharaan yang lebih baik terhadap rusunawa tersebut agar dapat dikelola dengan baik dan maksimal.

Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian diartikan sebagai pengaturan tim sesuai dengan yang ditentukan untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Organizing juga meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas.

Organisasi Pengurus Rusunawa merupakan upaya yang dilakukan oleh kelompok/tim kerja untuk mencapai tujuan kerja organisasi sehingga dalam melaksanakan tugas tercapai koordinasi dengan sendirinya dengan memperkuat kekompakan kelompok dalam hal menyelesaikan tugas dengan bekerja dengan baik. bersama-sama mencapai tujuan dan keinginan bersama dalam pengelolaan Rusunawa oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Saat ini Rusunawa dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru yang dibentuk oleh pemerintah kota. Mekanisme kerja dalam pelaksanaan pengelolaan Rusunawa oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru harus terlaksana dengan baik dan sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Koordinasi dilakukan dalam bentuk komunikasi internal dan eksternal serta diadakannya rapat kerja yang merupakan bentuk sosialisasi kepada seluruh masyarakat, berdasarkan wawancara dengan kepala UPT Rusunawa informan oleh Bapak Heri Rusdi S.T beliau mengatakan "ya, kalau sosialisai sudah kami lakukan sepenuhnya kepada masyarakat secara luar walapun masih bnyak yang belum menempati rusunawa karena masih banyak kamar yang masih belum ditempati atau ksoong" (Hasil Wawancara Pukul 10.00 WIB)

Dari hasil survei di atas, penulis dapat menganalisis bahwa mekanisme pekerja didasarkan pada struktur organisasi dalam penyelenggaraan Rusunawa yang dilakukan secara komprehensif untuk membangun kekompakan kelompok itu sendiri dalam bekerja untuk memaksimalkan sosialisasi di lingkungan tersebut. masyarakat.

Penyatuan kegiatan promosi keberadaan Rusunawa tentunya karena adanya keinginan akan perubahan dan kondisi yang lebih baik agar dapat dilestarikan, dibangun dan dikelola dengan baik sehingga dapat mengharumkan nama baik Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Rusunawa Bapak Salim yang bekerja di bidang ini menjelaskan: "Biasanya dilakukan promosi kepada penghuni apartemen dan ditetapkan batas waktu pembayarannya agar penghuni apartemen puas dan mengurangi bebannya dibandingkan sewa pada umumnya. " (Hasil wawancara Pukul 16.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa setiap tugas mempunyai tindakan yang dilakukan terhadap penghuni apartemen, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penghuni apartemen untuk mendapatkan keringanan dan keringanan dalam membayar sewa tersebut.

Pemerintah dan pihak-pihak terkait telah memberikan edukasi kepada masyarakat akan perlunya pengelolaan Rusunawa dan melakukan sosialisasi agar dapat merawat Rusunawa dengan baik melalui Perum Perumahan Kota Pekanbaru berdasarkan tugas pokok dan fungsi pengelolaan Rusunawa.

Tujuan Pemerintah Kota Pekanbaru membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yaitu untuk menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman dengan harga yang masih dapat di jangkau oleh masyarakat terutama masyarakat dengan berpenghasilan rendah (MBR). Karena Dinas Perumahan dan Cipta Karya belum mempublikasikan keberadaan Rusunawa di Kota Pekanbaru dan UPTD Penataan Rusunawa karena kendala biaya dan fasilitas lainnya yang belum memadai, maka masih banyak ruangan di Rusunawa yang belum terisi penuh.

Dalam penyelenggaraan pengurusan rumah susun, diadakan rapat sebagai bagian dari rapat kerja untuk membagi tugas dan mengembangkan kesamaan pendapat serta pemikiran untuk pengembangan rumah susun ke arah yang lebih baik, Kepala Bidang Rusunawa Heri Rusdi S.T menyatakan “Kami berupaya agar pengelolaan Rusunawa dapat dilaksanakan secepatnya sesuai SOP dengan selesainya pelayanan dan dilakukan dengan standarisasi yang jelas” (Hasil wawancara pukul 11.00 WIB)

Dari hasil survei di atas, penulis dapat menganalisis bahwa pengendalian dalam penyelenggaraan pengelolaan rumah susun dilakukan secara merata guna memudahkan keseluruhan tugas yang diinginkan dalam kegiatan pengelolaan rusunawa oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Prumikaman Kota Pekanbaru.

Dari hasil kajian terhadap indikator organisasi pengelolaan Rusunawa terlihat bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Cipta Karya Kota Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi kepada warga Rusunawa agar dapat tinggal di Rusunawa tersebut. dengan tertib, walaupun masih banyak ruangan atau ruang dalam pengelolaan Rusunawa yang belum terisi penuh bahkan ada pula yang kosong dan tidak terisi sama sekali.

Penggerakan / Mengarahkan

Mengarahkan kegiatan dalam penyelenggaraan rusunawa merupakan komitmen pimpinan untuk mencapai koordinasi yang baik dengan menyusun jadwal sehingga unit usaha dapat berjalan sesuai waktu yang direncanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru..

Pemahaman terhadap tugas yang ditetapkan oleh manajemen, kerjasama yang benar dan keselarasan tugas, yang dihasilkan dari kejujuran dan komitmen pegawai dalam menjalankan tugasnya sangatlah penting, yang terpenting harus mempunyai integritas yang tinggi, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan pegawai Kepala UPTD Rusunawa oleh Bapak Heri Rusdi menyatakan “Kalau dilihat dari syarat integritasnya maka harus sesuai dengan tindakan dan perilakunya, namun sebenarnya ada saja yang tidak menaatinya, namun kita wujudkan dengan ikhlas untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, yang

diimbangi dengan keikhlasan. pemahaman tentang tugas yang ditetapkan oleh pimpinan” (Hasil wawancara Pukul 10.00 WIB)

Dari hasil survey diatas dapat penulis analisa bahwa komitmen dan kejujuran sangat penting terutama bagi para pegawai yang dituntut memiliki integritas dan perilaku yang baik dalam menjalankan tugas pengelolaan Rusunawa yang ada di Pekanbaru, termasuk Rusunawa di Rumbai dan Rusunawa Rejosari.

Seluruh pengelola perumahan harus bekerjasama dalam menjalankan kegiatan dan program pengelolaan yang telah ditetapkan, namun masih banyak kegiatan pengelolaan perumahan yang belum dikelola dengan baik dan profesional. Kerja sama pengelolaan Rusunawa harus dilaksanakan dan dilaksanakan oleh semua pihak secara harmonis untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi pengelolaan Rusunawa itu sendiri Berdasarkan hasil wawancara dengan penghuni Rusunawa Bapak Iskandar, beliau mengatakan “ Kepala dinas perumahan biasanya mengelola administrasi rumah susun agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal dengan mengadakan rapat kerja di lokasi Rusunawa untuk membahas kepentingan administrasi rumah susun” (Hasil Wawancara Pukul 13.30 WIB)

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menganalisis bahwa sikap dan minat serta pengelolaan Rusunawa belum tertata dengan baik karena ketrampilan petugas dalam mengelola Rusunawa di Rumbai dan Rejosari belum maksimal. Pimpinan selalu memberikan motivasi kepada pengelola Rusunawa untuk mengelola dan merancang Rusunawa dengan benar dan maksimal. Pembangunan perumahan sederhana secara vertikal atau biasa disebut Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Pembangunan Rusunawa ini diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif rumah hunian untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang semakin tinggi, dengan mengedepankan efisiensi lahan tanah di perkotaan yang semakin sedikit.

Dalam hal ini pihak manajemen perlu lebih memperhatikan kondisi perekonomian para pegawainya, sehingga terkesan pihak manajemen sangat memperhatikan para pegawai yang berprestasi dalam pekerjaannya, sehingga hal ini dapat membuat para pegawai semakin semangat dalam bekerja, khususnya pengelolaan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Rusunawa Rusunawa menyatakan “tentunya pegawai sudah mengerti ketika dia menjadi pegawai, oleh sebab itu tidak ada hal yang perlu ditakutkan dan semua itu sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku dan diberikan beberapa pengarahan dan dorongan kerja berupa pemenuhan kebutuhan kepada pegawai sehingga dapat bersemangat lagi dalam melaksanakan pekerjaannya dalam pengelolaan rusunawa tersebut (Hasil wawancara pukul 11.00 WIB)

Dari hasil survei terlihat dan dianalisis bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai di tempat kerja dapat ditandai dengan mendorong pegawai bekerja dengan memenuhi kebutuhannya dan tentunya hal tersebut juga harus dilakukan dengan benar dan maksimal dalam lingkungan kerja. pengelolaan apartemen oleh semua pihak yang terlibat.

Hasil survei menunjukkan bahwa peran manajer dalam hal motivasi dan kepemimpinan adalah memberikan arahan dalam rapat kerja agar seluruh aktivitas manajemen di rumah dapat terlaksana secara maksimal, Berdasarkan hasil Wawancara dengan pegawai, menyatakan “pengelolaan rusunawa itu dilaksanakan dengan sesingkat-singkatnya sesuai

dengan SOP dengan penyelesaian pelayanan sesuai dengan standarisasi yang jelas” (Hasil wawancara pukul 11.00 WIB)

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menganalisis bahwa pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan rumah susun dilakukan sesingkat mungkin guna memudahkan tugas yang diinginkan secara keseluruhan dalam kegiatan pengelolaan rusunawa oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian pada indikator pengelolaan, dimana pihak manajemen telah memotivasi pegawai untuk bekerja sama dengan aparaturnya pengelola rusunawa sehingga dapat melaksanakan pengelolaan rusunawa dengan benar dan maksimal. Pemberian motivasi dilakukan dalam rapat kerja dan diskusi bersama dalam penataan yang ada saat ini yang lebih baik dan diminati oleh masyarakat yang tinggal di rumah susun.

Pengawasan

Pemantauan atau pengendalian merupakan suatu fungsi yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana dan program kerja dilaksanakan secara efisien dan efektif, meskipun telah terjadi berbagai revisi dari waktu ke waktu, namun masih dalam koridor kebijakan, rencana dan program yang telah ditetapkan. Melalui fungsi ini, setiap anggota pengurus dapat mengevaluasi hasil kerjanya sendiri dan menerima masukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Mengawasi proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan perbaikan guna perbaikan lebih lanjut. Menciptakan pemerintahan yang bersih. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi terhadap permasalahan kinerja yang ada. Memberikan pendapat terhadap kinerja organisasi, meningkatkan kelancaran fungsi organisasi dan menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, keterlibatan dan akuntabilitas. Pengawasan adalah kegiatan melihat, mengamati dan menilai tindakan pegawai dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai apakah sesuai dengan tujuan atau tidak.

Sistem pengawasan perumahan harus dilaksanakan untuk menjamin seluruh kegiatan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan perumahan dilakukan dengan cara memeriksa kegiatan perumahan apakah sudah sesuai dengan sistem dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan atau belum, sehingga dilakukan pengawasan terutama oleh pengelola perumahan yang ada, hal tersebut disampaikan Kepala UPTD oleh Bapak Heri Rusdi, menyatakan “ Yang mengawasi rusunawa adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru melalui UPTD Rusunawa untuk melihat dan memantau perkembangan rusunawa (Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Rusunawa pukul 10.00 WIB)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Heri Rusdi bahwa : Pengawasan dalam pengelolaan rusunawa dilakukan oleh UPT, dalam hal ini bagaimana kita bisa melakukan pengayoman terhadap penghuni, memenuhi kebutuhan-kebutuhan tentang standar pelayanan penghuni, kenyamanan, keamanan, kebersihan lingkungan. Prinsipnya pengawasan ini yaitu meningkatkan pelayanan yang baik bagi penghuni rusunawa terutama (perilaku)”

Dari hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa pengawasan terhadap rumah susun dilakukan oleh pihak pengelola rumah susun tersebut di atas guna mengetahui sejauh mana

pelaksanaan pengelolaan rumah susun telah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh para pengelola rumah susun.

Peran pemimpin dalam mengendalikan pekerjaan pegawai sangat besar dan penting untuk menunjang tingkat keberhasilan program kegiatan. Hal tersebut diungkapkan penghuni rusunawa sebagai berikut Bapak Salim “Mereka biasanya memberikan sanksi berupa teguran kepada penghuni yang tidak membayar sewa, dan jika tidak membayar, mereka diusir dari rumah susun” (Hasil wawancara pukul 16.30 WIB)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelola menjalankan tanggung jawab pengawasan dan menegur pengelola apabila tidak melaksanakan tugasnya dalam mengelola dan mengawasi pekerjaan pemeliharaan, dan masyarakat diberi teguran bila tidak membayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Peran pengelola dalam mengawasi rusunawa yang ada sangat berpengaruh dalam tingkat keamanan penghuni. Hal tersebut disampaikan penghuni rusunawa Bapak Suarji “ Dalam segi keamanan yang ada di rusunawa ini sangat terjamin dikarenakan adanya pos keamanan dan security yang bertugas di rusunawa ini, sejauh ini belum adanya kehilangan sepeda motor dan fasilitas yang ada di rusunawa ini”

Hasil wawancara menunjukan bawah peran pengelolaan yang ada dirusunawa ini dalam segi keamanan sangat memberikan pengawasan yang baik.

Penyelenggaraan Rusunawa dilaksanakan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa tujuan pengelolaan Rusunawa adalah berhasil dan efektif dalam menyediakan perumahan yang terjangkau, layak, nyaman, aman dan sehat bagi penghuninya.

Dari hasil indikator pemantauan terlihat bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru memberikan teguran kepada penghuni rusunawa bila gagal memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan memberikan teguran kepada pengelola apartemen bila gagal memenuhi pengelolaannya. tugas.

Dari hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa kegiatan pengawasan dilakukan dengan cara memantau kegiatan pengelolaan rumah susun dan memberikan peringatan kepada pengelola jika terjadi kelalaian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta memberikan peringatan kepada penghuni. atas apartemen apabila terjadi kelalaian dalam pembayaran sewa, baik pada Yos Sudarso maupun Rejosari.

Hasil penelitian Pengelolaan Rusunawa Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan masih banyak runagan yang belum ditempati oleh penghuni rusunawa dalam perencanaan Rusunawanya lebih di tingkatkan lagi sesuai dengan Peraturan tentang Kelembagaan yang khususnya mengenai Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan ke 4 (empat) indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Rusunawa oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam pengelolaan rusunawa belum menunjukkan tahap keberhasilan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kelemahan yang di lihat dari fungsi manajemen pemerintahan. Pertama yaitu planning, pada tahap ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak memiliki program/kegiatan indikator kinerja yang difokuskan untuk pengelolaan rusunawa. Kedua yaitu organizing, ditahap ini Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk UPTD dan

merumuskan tugas yang dibutuhkan dalam pengelolaan rusunawa. Ketiga yaitu penggerakan/ mengarahkan, dalam pengelolaan rusunawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum optimal, karena masih banyak penghuni yang menunggak pembayar sewa dan penghuni rusunawa yang masih sedikit. Keempat yaitu controlling, dalam pengelolaan rusunawa yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kurang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPTD tentang faktor yang mempengaruhi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Kota Pekanbaru antara lain :

1. Faktor Internal

- a. Dilihat dari Penegakan Sanksi Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Terhadap Penghuni Rusunawa Yang Tidak Membayar Sewa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagai pengelola rusunawa tidak tegas dengan aturan yang telah berlaku, dimana penghuni yang tidak membayar uang sewa dalam 3 bulan berturut-turut penghuni harus meninggalkan rusunawa. Sesuai aturan pemutusan perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Pasal 30 ayat c yang berbunyi: Pihak kedua tidak membayar uang sewa selama 3 bulan berturut-turut dinyatakan telah berakhir.
- b. Tidak adanya fasilitas untuk pengelola rusunawa dalam kegiatan proses sosialisasi seperti kendaraan operasional lapangan yang sangat berpengaruh sehingga mereka memiliki keterbatasan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi rusunawa ini secara menyeluruh di wilayah Kota Pekanbaru dan menyebabkan kegiatan sosialisasi tidak berjalan dengan efektif. Dimana sosialisasi ini juga sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk menghuni rusunawa tersebut.

2. Faktor Eksternal

- a. Rendahnya Minat Masyarakat Untuk Menghuni Rusunawa Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan permukiman rusunawa sangat berpengaruh pada minat masyarakat, dimana minat masyarakat ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan rusunawa. Dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru bekerjasama dengan media massa untuk mempromosikan rusunawa kepada masyarakat.
- b. Sarana transportasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk menarik masyarakat menyewa rusunawa. Di dalam pengelolaan rusunawa menemukan kendala pada bagian sarana transportasi. Jika tidak ada sarana transportasi seperti (TMP dan oplet) bagaimana masyarakat yang tidak memiliki kendaraan menyewa rusunawa. Minat masyarakat belum banyak karena terkait transportasi aksesnya agak jauh dan sarananya belum ada belum di lewatin jalur umum.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada pengelolaan perumahan sewa sederhana (RUSUNAWA) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Pekanbaru, banyak penelitian yang peneliti temui berdasarkan observasi langsung di lapangan, Berdasarkan temuan penelitian telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan namun kurang optimal karena masih bnyak ruangan yang belum ditepati oleh penghuni Rusunawa.
2. Masih terindikasinya Peraturan yang tentang kelembagaan yang khususnya mengenai tugas pokok dan fungsi yang belum optimal sehingga pengelolaan dari Rusunawa tersebut belum berjalan sesuai dengan aturannya yang sudah di ditetapkan.
3. Dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan makan juga berpengaruh dalam pengelolaan rusunawa tersebut.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

George Terry, 2012, Prinsip-Prinsip Managemen, PT Bumi Aksara, Jakarta

Hasibuan, Malayu S. P. 2014, Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas). PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Handayani 2014, Perkembangan Penduduk, Jakarta, Gralia Indonesia.

Ibrahim, Amin 2013. Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implikasinya. PT. Refika Aditama. Bandung.

Indrawijaya, Adam I, 2013, Perilaku Organisasi, Sinar Baru Algensindo Bandung.

Jhon Suprihanto, 2014 Pengantar Managemen, Bumi Aksara Jakarta.

Makmur, 2013. Filsafat Administrasi. Bumi Aksara. Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung.

-----, 2012. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung.

Pasolong, 2013 Metode Penelitian Administrasi Publik, Alfabeta. Bandung.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi*

Nada Meylan Syahyan Putri dan Ema Fitri Lubis

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 / 2024

915

Publik, 14(1).

- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.

- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS

(AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.

- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.

- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.

- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.

- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.

- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Priansa, Doni Juni. Agus Garnida. 2013. Manajemen Perkantoran Efektif, Efesien dan Profesional. Alfabeta. Bandung.
- Siagian. SP 2014. Reformasi Pelayanan Publik (TEORI, Kebijakan dan Implementasi), PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sopiah, 2013. Pengantar Manajemen. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutopo, 2012. Pelayanan Organisasi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syafi'I, Inu Kencana. 2012. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Sanri), PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- 2013, Manajemen Personalia, Yogyakarta. Gadjah mada University Press.
- Zulkifli. 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen. Pekanbaru. UIR Press.
- Zulkifli. et. al. 2013. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa. Pekanbaru: Fisipol UIR
- Zulkifli Dan Yogya, Moris Adidi. 2014. Fungsi-Fungsi Manajemen. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing
- Afsari Yolana S, 2019 tentang Evaluasi Pengelolaan rumah Susun Sederhana Sewa Kota Semarang

Regulasi:

- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 16 Tahun 2016 Tentang Rincian Tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 16 Tahun 2015 tentang tarif Sewa Rusunawa
- Peraturan Walikota No. 161 tentang Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rusunawa
- Rencana kerja 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru